

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aarce Tehupeior, 2021, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UKI Pers.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ari Dwipayana, 2008, *Arah dan Agenda Reformasi DPRD: Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jakarta: USAID.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta.
- B. N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Sinar Harapan.
- C.S.T. Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Feri Amsari, dkk, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia*, Malang: Intrans Publishing.
- Hernimawati, 2016, *Peran DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM)*, Jakarta: Konstitusi Pers, Cet.Ke 2.
- 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI: Jakarta.
- 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP: Jakarta.
- 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joenaidi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

- Muhtar Haboddin, 2016, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Malang: UB Press.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca Reformasi*, Kencana: Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Setio, S.E, 2013, *Recall Parpol Dalam Sistem Demokrasi Indonesia*, Bali: Penerbit Udayana.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta
- Suratman, H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Yusdianto, 2018, *Etika Politik dalam Penyelenggaraan Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesi Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-1V/2006 tentang Hak *Recall* oleh partai politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 tentang *Recall* anggota DPR.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 tentang *Judicial Review* AD/ART partai demokrat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem proporsional terbuka.

Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP/2022 Terkait Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Asahan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023.

D. Jurnal

A.A.Ngurah Agung Putra Prawira dan A.A.Istri Ari Atu Dewi, “Pengaturan Tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia”, Jurnal Kertha Negara.

Asmawi, 2014, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 1 Juni 2014.

Benito Asdhie Kodiyat M.S., Et., Al, 2023, *The Authority of the Governor Regarding Termination of Members of the Regional People's Legislative Assembly in the*

- Perspective of State Administration in Indonesia*, Delegata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No. 2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ellyana Rosana, 2012, *Partai Politik dan Pembangunan Politik*. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 8 No. 1, 2012, Lampung: IAIN Raden Intan.
- Firdaus & Nalom Kurniawan, 2017, *Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 3.
- Hardianto Djanggih & Nurul Qamar, 2017, *Peran Mahkamah Partai dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik*. Jurnal Yuridika, Vol. 32 No.1.
- Indirwan & Agus Riwanto, 2021, *Analisis Pengaturan tentang Pemberhentian Antarwaktu (Recall) Partai Politik terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat*. Jurnal Res Publica Vol.5 No.2 2021.
- Iswatul Hasanah dan Jazim Hamidi, 2014, “*Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)*”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- 2006, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4.
- Khairul Fahmi, 2016, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.2.
- Meray Hendrik Mezak, 2006, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*,” Law Review 5, No.3.
- Metrina Tosika, Khairul Fahmi, Asrinaldi, 2020, *Integrasi Laporan Keuangan dan Dinamika Dana Kampanye Partai Politik*, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. V No. I, Padang: Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Mochammad Rizky Fauzi Pancasilawan, Et.Al. 2024, *Penyelesaian Sengketa Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Melalui Pengadilan Tata*

Usaha Negara, Jurnal Hukum Prima: Pascasarjana Universitas Airlangga, Vol.7 No.2 Oktober 2024.

Muhammad Adam Ilhamsyah, *Et.Al*, 2024 “*Kontroversi Mekanisme Paw Anggota Dpr Terhadap Kedaulatan Rakyat: Tinjauan Sosiologi Politik*,” Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol.9, No. 4

Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, *Et.Al.*, 2018, *Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 No.4.

Muhammad Mutawalli, *Et. Al*, 2023, *Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR: Tinjauan Constituent dan Public Recall*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.10 No.2

Muhammad Ananda Pratama, 2023, *Problematika Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik*, Jurnal At-Tanwir Law Review: UII, Vol. 3 Nomor 1 tahun 2023.

Muhammad Irfan Hilmy & Trian Marfiansyah, 2021, *Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia*, Volksgeist, Vol. 4 No. 1.

Muh. Kausar, 2015, *Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik*, Jurnal Politics Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol 1, No. 2.

Muttaqien, A, 2020, *Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik terhadap Demokrasi*, Jurnal Sosial Humaniora Sigli.

Nabila Okta Sofiana, Mustofa, 2025, *Problematika Penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Representasi Politik yang Adil*, Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.5, No.1.

Nike K. Rumokoy, 2021 “*Kajian Yuridis Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,” Jurnal Kajian Yuridis, Edisi Vol. 20 No. 1, Januari-Maret 2021.

Rahmawati Yunus, 2025, *Analisis Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Jurnal Hukum Caraka Justisia, Vol.5 No.1.

Rida Farida 2013, *Mekanisme Penggantian Antawaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum, 1(2).

Siti Aminah, 2020, *Perjanjian Pembagian Masa Jabatan Anggota Legislatif: Perspektif Hukum dan Etika Politik*, Jurnal Hukum Demokrasi Vol 5, No. 2.

Sri Wahyuni. Et. Al, 2022, *Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerja Sama Waralaba: Tinjauan Asas iktikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-Hak Para Pihak*, Jurnal Keamanan Nasional Volume VIII, Nomor. 2, November 2022.

Widiananto Nanda Prasetya dan Mohammad Syaiful Aris, 2024, *Pergantian antarwaktu calon legislatif terpilih yang meninggal dunia dalam pelaksanaan pemilihan umum*. Jurist-Diction, Vol.7 No.4.

Yebi Febri, Putri Ayu Lestari, Pebina Lumban Gaol, dan Royki Setiawan, 2023, “Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten atau Kota,” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.

F. Skripsi

Yovi Oktarina, 2023, “Analisis Yuridis Alasan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sumatera Barat oleh Partai Politik dalam Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat Periode 2019-2024.” Skripsi Universitas Andalas, Padang.

G. Website

Diberentikan sepihak, Anggota DPRD Asahan Ilham Sarjana Terancam PAW”, <https://analisadaily.com>, diakses pada 17 November 2025.

Pengertian Mahkamah Partai Politik yang Menjaga Keadilan Politik, 2025, KPU Papua Pegunungan, <https://papuapegunungan.kpu.go.id>. Diakses pada 03 Februari 2026.

Heniwati, 2021, “Mekanisme PAW Anggota Dewan”, <https://www.kpu.go.id>. diakses 18 Februari 2026.

Rachel Imanuela Jayadi, 2025, “Penonaktifan dan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR”, <https://lp2kifhuh.org>, diakses 18 februari 2026.

